

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN IMAM HASAN
AL-BANNA TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

LUTFI ALIFAH

NPM. 1621020010

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG 1442 H/2020 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN IMAM HASAN
AL-BANNA TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

LUTFI ALIFAH

NPM. 1621020010

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Drs. HenryIwansyah, M.A.

Pembimbing II : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG 1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Mendirikan suatu negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan rakyat merupakan kewajiban agama yang paling agung karena agama tidak mungkin tegak tanpa ada negara atau pemerintahan. Ukuran tegaknya nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, keteraturan dan keadaban hanya mungkin dilakukan melalui negara atau pemerintahan. Sementara itu, konsep atau bentuk negara itu sendiri tidak diatur dalam Islam secara jelas. Untuk mewujudkan negara Islam tidak ada perintah dalam Islam. Dalam Al-Qur'an memang tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan Islam untuk mendirikan negara. Tetapi unsur dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat ditemukan didalam kitab suci itu. Kalau ada negara yang menyebut dirinya sebagai negara Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah nabi atau konstitusi negara yang berdasarkan syari'at Islam tetapi praktik penyelenggaraan negara jauh dari ajaran Islam, etika Islam tidak menjadi dasar dalam bagi pelaksanaan pemerintahannya, perilaku elite negara tidak jujur, tidak adil dan tidak amanah maka negara tersebut tidak bisa disebut sebagai negara Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep negara Islam menurut Imam Hasan Al-Banna? dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap pemikiran Imam Hasan Al-Banna tentang konsep negara Islam? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep negara Islam menurut Imam Hasan Al-Banna dan untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap pemikiran Imam Hasan Al-Banna tentang konsep negara Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing dan sistematisasi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan menganalisis data dengan menggunakan deskriptif analitik dengan metode *content analysis*. Jadi kesimpulannya adalah menurut Hasan Al-Banna yang dimaksud negara Islam adalah negara yang tegak diatas syari'at Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosialnya, memperoklamasikan prinsip-prinsipnya yang lurus dan menyampaikan dakwahnya dengan bijak ke segenap manusia. Dengan berdirinya negara Islam maka penerapan Islam sebagai sistem kehidupan yang integral dapat dilaksanakan. Berdirinya negara Islam begitu penting karena menurut Hasan Al-Banna segala konsep amal harus sesuai dengan sistem Islam. Tujuan akhir dai kehidupan Islam tidak akan terwujud tanpa terentuknya sebuah *Daulah Islamiyah Al-Amaliyah*. Konsep Negara Islam menurut Hasan Al-Banna memiliki banyak persamaan dengan Negara Islam dalam konsepsi Fiqh Siyasah. Hal ini berdasarkan pada penjelasan bahwa Negara Islam merupakan Negara yang tegak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan umat muslim memperoleh jaminan keamanan dalam negara serta dalam negara Islam hak kewarganegaraan kaum minoritas sangat dijunjung tinggi. Adapun perbedaan mengenai bentuk negara Islam dimana dalam Fiqh Siyasah bentuk dan model negara Islam yang dimaksud adalah Khilafah sedangkan Hasan Al-Banna tidak mempertimbangkan nama dan bentuk



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudari:

Nama : Lutfi Alifah

NPM : 1621020010

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyāṣah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pemikiran Imam Hasan Al-Banna Tentang Konsep Negara Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Henry Iwansyah, M.A.

NIP. 195812071987031003

Drs. Susiadi AS, M.Sos. I

NIP. 195808171993031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Frenki, M.Si

NIP. 1980031220090110



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Hasan Al-Banna Tentang Konsep Negara Islam”. Disusun oleh Lutfi Alifah NPM 1621020010, Program studi Siyasah Syar’iyyah. Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Senin, 31 Agustus 2020.

Tim Penguji

Ketua

: Dr. Jayusman, M.Ag

Sekretaris

: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

Penguji Utama

: Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji Pendamping I

: Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji Pendamping II

: Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Shairuddin, M.H

NPM 166210221993031002

MOTTO

*“Tegakkan Islam dalam dirimu
Niscaya Islam akan tertegak diatas bumimu”*

~Imam Hasan Al-Banna~

PERSEMBAHAN

Dengan keridhoan hati dan rasa bersyukur kepada Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua tercinta Bpk Zainal Kholiq dan Ibu Nasipah yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa seperti ini, serta senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan saya dan berkat restu keduanya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.
2. Kepada adikku Aqnal Lukman Hakim dan Fariz Imamul Hakim serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberikan pengarahan serta dorongan demi keberhasilan terselesaikannya skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Lutfi Alifah lahir di Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada tanggal 11 Januari 1998. Lahir dari pasangan suami istri ayahanda Zainal Kholiq dan Ibunda Nasipah. Merupakan anak pertama dan mempunyai saudara kandung laki-laki bernama Fariz Imamul Hakim dan Aqnal Lukman Hakim. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Serdang selesai pada tahun 2003, SD Negeri 3 Serdang Tanjung Bintang selesai pada tahun 2010, MTsN 1 Tanjung Karang selesai pada tahun 2013, MAN 2 Tanjung Karang selesai pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa aktif dalam menjalankan Perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan menuju kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan agama Islam.

Judul skripsi ini Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Hasan Al-Banna Tentang Konsep Negara Islam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), pada Program Strata satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkann bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.

2. Dr. H. Khairuddin, M.H., Selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. A Kumedi Jafar, S.Ag., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Frenki M.Si., Selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Hervin Yoky Pradikta, M.H.I., Sebagai Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Drs. Henry Iwansyah, M.A., Selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing saya sehingga skripsi ini selesai.
9. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I., Selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen civitas akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
11. Bapak dan Ibu staff karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah, perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

12. Untuk teman-temanku tercinta terkhusus Siyasah A angkatan 2016
Ellemia, Desti, Hendi, Hepi, Marendy, Otoy, Rasyid, Wahyu, Ragil, Rijal,
Naufal, Yurnedi dan yang lainnya.
13. Sahabat-sahabatku Indah, Elina, Tiara, Yolana, Afifah, Uspan, Sangkun,
Zahratul, Elsy, Osa, Diyas, Ilma, Ayu Sarah, Mahfiro, Ijal, Reja, Ricky,
Panji.
14. Sahabat KKN ku kelompok 43 Rani, Nisa, Sari, Deri, Fikri.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan dana yang dimiliki. Akhirnya niat tulus dan ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau penelitian berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, 02 Juli 2020
Penulis

Lutfi Alifah
NPM. 1621020010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Signifikasi Penelitian	7
H. Metode Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Fiqh Siyasah Ruang Lingkup dan Tujuan Berdirinya Negara Menurut Fiqh Siyasah.....	11
B. Negara Dalam Konsepsi Islam	20
C. Pembagian Negara Dalam Islam	25
D. Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Fiqh Siyasah	30
E. Tinjauan Pustaka	40
BAB III PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM	
A. Biografi Hasan Al-Banna	42
B. Karya-Karya Hasan Al-Banna.....	45
C. Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Konsep Negara Islam	52

BAB IV ANALISA

- A. Konsep Negara Islam Menurut Hasan Al-Banna72
- B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang
Konsep Negara Islam.....74

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....77
- B. Rekomendasi78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai awal dalam memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul yang dimaksud adalah **ANALISIS FIQH SIYASAH TEHADAP PEMIKIRAN IMAM HASAN AL-BANNA TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. Fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam.²
3. Pemikiran adalah memikirkan suatu kebenaran yang sudah ada untuk mendapatkan kebenaran yang baru.
4. Hasan Al-Banna adalah ulama yang juga tokoh pemimpin gerakan Islam dunia yang sangat legendaris, ia adalah pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin.

¹ Kementran Pendidikn Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

² Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), h. 10.

5. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.³
6. Negara Islam adalah negara yang dalam menjalankan pemerintahan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah serta pemegang kekuasaanya orang muslim.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Hasan Al-Banna adalah seorang mujahid dakwah, peletak dasar-dasar gerakan Islam. Ia memperjuangkan Islam menurut Al-Quran dan sunnah. Ia berupaya meluruskan pemahaman Islam dan mengembalikan nilai-nilai ajaran Islam yang telah dibuang oleh umat Islam yang menginginkan aqidah tanpa syariah, agama tanpa negara, dan kebenaran tanpa kekuatan, perdamaian tanpa perjuangan.

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok pembahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah jurusan Siyasah.
- b. Belum ada yang membahas persoalan ini.

C. Latar Belakang

Hasan Al-Banna dipandang sebagai tokoh pembaru Islam yang layak disejajarkan dengan tokoh-tokoh pembaru yang muncul pada masa-masa sebelumnya. Dengan seluruh karakter yang melekat pada dirinya,

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), h. 725.

kiranya dia layak menjadi representasi dari tokoh kebangkitan Islam abad ke-20. Sedangkan kehadiran Al-Ikhwān Al-Muslimūn sendiri merupakan jawaban terhadap krisis yang melanda umat Islam di abad ini. Krisis yang tengah melanda umat Islam saat ini tidak lagi terkonsentrasikan pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan umat, melainkan menyentuh keseluruhannya. Hampir dalam semua segi, kaum Muslimin mengalami kemunduran.⁴

Hasan Al-Banna dilahirkan pada Tahun 1906 M dan meninggal sebagai syuhada' pada tahun 1949 M. Kurun waktu tersebut merupakan masa-masa kritis hubungan kaum Muslimin-kolonial. Ketika Hasan Al-Banna menginjak remaja, perang dunia pertama telah berakhir. Hampir seluruh Negara Islam kecuali Hijaz dan Yaman telah jatuh ke tangan penjajah. Inilah fenomena pertama yang menggerakkan jiwa Hasan Al-Banna. Tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba *Khilafah Islamiyah* telah runtuh. Konsekuensinya, persatuan umat Islam tidak dapat dipertahankan. Kaum kolonial telah menutup umat Islam dari dakwah dan konsep-konsep agama yang sebenarnya.⁵

Al-Banna menyesuaikan isi negara Islam dengan sistem politik yang ada Mesir, ia menghindari konfrontasi dengan negara dan cenderung menyatakan pandangan secara umum serta enggan menyebutkan visi

⁴ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid I*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2018). h. vvi.

⁵ Anwar Al-Jundi, *Biografi Hasan Al-Banna*, (Solo: Media Insani Press, 2003) h. 10-11.

negara Islam.⁶ Dikalangan jumhur ulama berpendapat bahwa Islam mengharuskan adanya negara dan pemerintahan, disamping itu meskipun jumlahnya kecil ada pula yang hanya membolehkan saja. Dalam pada itu ada pula putra-putra Islam pada zaman mutakhirin ini yang berpendapat bahwa tidak perlu ada campur tangan agama dalam kehidupan negara.⁷

Mendirikan suatu negara atau pemerintahan untuk memperoleh urusan rakyat (umat) merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa negara atau pemerintahan. Ukuran tegaknya suatu nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, keteraturan dan keadaban hanya mungkin dilakukan melalui negara atau pemerintahan.⁸

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.*
(Q.S Al-Baqarah, 2:208)

⁶ Otoman, “Pemikiran Politik Hasan Al-Banna (1906-1949) dan Pembentukan Radikalisme Islam”. *Jurnal Tamaddun*, Vol. XV, No. 1 (Januari-Juni 2015), h. 58.

⁷ A Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) h. 80.

⁸ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia (Pertautan Negara, Khiafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi)*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008), h.13.

Fiqh siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun didalam Al-Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an, tetapi unsur-unsur dasar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, persamaan.⁹

Prinsip-prinsip bernegara diatas sebagai umat Islam, adapun pedoman dalam menjalankan kehidupan terkait dengan masalah dunia yakni Q.S Al-Israa' ayat 9.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar*”. (Q.S Al-Israa' 17:9)

Pentingnya hukum Islam dalam kehidupan bernegara dalam rangka mengelola dan mengatur seluruh kehidupan berantakan, tidak terarah,

⁹ Dea Fanny Utari, “*Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila*”, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), h. 4.

kejahatan di dunia akan merajalela. Maka kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama dalam hal ini Islam memandang negara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan dunia saja, tujuan pembentukan negara dalam membentuk hukum bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.¹⁰

Islam memaknai di dunia saling berkaitan antara hubungan manusia dengan sang maha pencipta (Allah SWT) dan hubungannya dengan manusia dalam bermasyarakat dalam melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar. Di kalangan pemikir sunni berpandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban.¹¹

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pemikiran Imam Hasan Al-Banna tentang Konsep Negara Islam menurut Fiqh Siyasah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep negara Islam menurut Imam Hasan Al-Banna?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap konsep negara Islam menurut Imam Hasan Al-Banna?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini adalah :

1. Mengetahui konsep negara Islam menurut Imam Hasan Al-Banna.

¹⁰ *Ibid*, h. 6.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia, 2014), h.122

2. Mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap konsep negara Islam menurut Imam Hasan Al-Banna.

G. Signifikan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan tentan hukum. Khususnya yang berkaitan dengan Hukum Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.
 - b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah.
 - c. Memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian dibidang ini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian.¹²

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Reserch* (Penelitian Kepustakaan). *Library Research* adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.¹³
- b. Sifat penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode *deskriptif analitis*, metode ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara actual dan cermat,¹⁴ artinya dengan mendeskripsikan pemikiran seorang tokoh yaitu Imam Hasan Al-Banna mengenai negara Islam secara komprehensif untuk

¹² Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.26.

¹³ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

¹⁴ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, h. 29.

kemudian dianalisa secara logis, sehingga mendapat suatu kesimpulan terhadap pemikiran Imam Hasan Al-Banna tentang negara Islam dalam pandangan Fiqh Siyasah.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta dan fenomena terhadap pemikiran-pemikiran *Imam Hasan Al-Banna* mengenai negara Islam. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, koran, media online, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan berbagai instrument pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku atau referensi lain.¹⁵

5. Metode Pengolahan Data

¹⁵ Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1998), h. 37.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
 - b. Sistem data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.
6. Metode Analisa Masalah

Adapun metode analisa masalah yang penulis gunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi yang bersifat tertulis atau tercetak dalam media massa. Metode ini digunakan penulis dengan melihat struktur isi pemikiran Imam Hasan Al-Banna tentang konsep negara Islam, karena dengan menggunakan metode analisis isi (*content Analysis*) penulis dapat menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.

BAB II

NEGARA ISLAM MENURUT FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah Ruang Lingkup dan Tujuan Berdirinya Negara

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh

mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.¹⁶

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-daulyah* (hubungan internasional). Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan". Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang

¹⁶ J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta :Penerbit Ombak : 2014), h. 23-24.

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemsalahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁷

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.¹⁸

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintahan tentang :

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter).
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan).
- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang) dan
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara).

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu :

- a. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan).
- b. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 3-4.

¹⁸ *Ibid*, h. 14.

- c. *Siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter).
- d. *Siyasah dauliyyah* (hubungan Internasional)

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasahh Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).¹⁹

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan).

¹⁹ *Ibid*, h. 14-15.

b. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (hubungan internasional)

c. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter).

Salah satu objek kajian *fiqh siyasah* adalah *siyasah dusturiyyah*. *Dusturiyyah* berasal dari bahasa Persia yang yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyyah* berkembang pengertiannya menjadi asa dasar/pembinaan.

Menurut istilah, *dusturiyyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁰

Sumber *fiqh siyasah dusturiyyah* pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan khulafa al-

²⁰ Gita Fitriyani, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*", (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019), h. 29.

rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, terorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, didalam masalah *fiqh dusturiyyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyyah*.²¹

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan. Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.²²

3. Tujuan Berdirinya Negara

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h.53.

²² *Ibid*, h. 77.

hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi saja, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.²³

Ibn Abi Rabi menjelaskan tujuan negara dengan pandangan sosiologis historis. Menurutny, manusia diciptakan Allah Swt. dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia secara pribadi tidak mungkin mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Mereka membutuhkan orang lain. Namun dalam hubungan ini tidak tertutup kemungkinan mereka tergoda oleh pengaruh jahat. Menurut Ibn Abi Rabi ada tiga kejahatan yang meliputi manusia, yaitu kejahatan yang bersumber dari manusia itu sendiri, kejahatan yang datang dari sesama mereka, dan kejahatan yang datang dari masyarakat lain. Kejahatan pertama dapat dihindari dengan menjalankan kehidupan yang baik, mengendalikan diri dan menggunakan akal dalam menyelesaikan persoalan. Kejahatan kedua dapat dicegah dengan menegakkan dan memenuhi hukum-hukum Allah. Artinya, siapa yang bersalah harus dihukum sesuai dengan ketentuan-Nya. Adapun kejahatan ketiga dapat dihindarkan dengan pembentukan negara. Inilah tujuan negara menurut Ibn Abi Rabi. Dengan pembentukan negara maka manusia dapat

²³ *Ibid*, h. 154.

menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan mencegah intervensi dari pihak-pihak asing.

Secara umum, Al-Mawardi menjelaskan bahwa tujuan pembentukan negara (*imamah*) adalah mengganti kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur dunia (*al-Imamah maudhu'ah likhilafah al-nubuwwah fi hirasah al-din wa siyasa al-dunya*). Sementara Ibn Khaldun merumuskan tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan rakyat.

Dari penjelasan tiga pakar politik Sunni diatas dapat ditarik benang merah bahwa tujuan negara dalam Islam bukan hanya untuk duniawi saja, melainkan juga untuk hal-hal yang bersifat ukhrawi. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Lebih lanjut, Al-Maududi menjelaskan tujuan pendirian negara dalam Islam dengan mengutip Q.S Al-Hadiid ayat 25 dan Q.S Al-Hajj ayat 41.²⁴

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka

²⁴ Ibid, h. 155.

mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.” (Q.S Al-Hadiid, 57:25).

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْكَ الْأُمُورِ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (Q.S Al-Hajj, 22:41).

Dari dua ayat di atas, Al-Maududi menegaskan bahwa kejahatan yang tidak dapat dimusnahkan melalaui ajaran Al-Qur'an, membutuhkan kekuasaan memaksa dari negara untuk pembasminya. Ini berarti, bahwa tujuan negara dalam Islam adalah untuk menegakkan dan melaksanakan kekuasaannya dengan segenap sumber daya yang ada untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk semua.²⁵

Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia. Di samping itu, negara juga didirikan untuk melindungi manusia dari kewenangan-kewenangan satu golongan atau orang terhadap orang atau golongan yang lain. Negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan memaksa agar peraturan-peraturan yang diciptakannya dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan

²⁵ *Ibid*, h. 156.

ajaran Islam itu sendiri. Namun demikian, negara sendiri bukanlah tujuan dalam Islam, melainkan hanya sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan kemaslahatan manusia.²⁶

Ghazali menyatakan tujuan bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin dipenuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akherat nanti melalui pengamalan dan penghayatan agama, secara benar, sedangkan yang demikian itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa keserasian kehidupan duniawi.²⁷

Muhammad Asad menyatakan tujuan negara itu adalah menjalankan persamaan hak dan keadilan, menuju yang hak dan menentang yang salah.²⁸

B. Negara Dalam Konsepsi Islam

Kelompok yang mendukung legal formal Islam dalam politik berasumsi, bahwa Islam merupakan agama yang terintegrasi dengan seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya politik. Karena asumsi itu, kelompok ini pun hendak memperjuangkan legal formal syari'at Islam dalam politik kenegaraan dengan mendirikan parati politik sebagai sarana berjuang, meski ada pula yang tidak mendirikan partai politik dengan

²⁶ *Ibid*, h. 157.

²⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI Press, 2011) h.76.

²⁸ Zakaria Syafe'I, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyasa*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka 2012), h. 38.

berbagai alasan. Sementara, kelompok (lembaga dan individu) yang menentang pelegalformalan agama dalam politik kenegaraan berasumsi bahwa pencampuran antara agama dan politik tidak saja mencemarkan kesucian agama, tapi juga membahayakan eksistensi agama. Karena dalam kenyataannya agama hanya sebatas alat untuk memperoleh legitimasi kekuasaan politik dan mereka sendiri tidak bias menjadi teladan bagi umat selain perjuangan politiknya yang tidak memberikan perhatian pada pemihakan atau pembelaan terhadap agama. Bahkan mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari belum mampu merealisasikan nilai-nilai Islam dan perilaku politik mereka jauh dari nilai-nilai etika Islam.²⁹

Sementara itu, konsep negara atau bentuk negara itu sendiri tidak diatur dalam Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) secara jelas. Untuk mewujudkan negara Islam tidak ada perintah dalam Islam. Menurut Amien Rais, selama suatu negara menjalankan etos Islam kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian, yang jauh dari eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan atas golongan yang lain berarti menurut Islam sudah dianggap baik. Suatu negara meski tidak berlabelkan Islam menurut Amien Rais, tapi menjalankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan berpihak pada kepentingan rakyat, negara itu sudah dapat dikategorikan sebagai negara Islam.³⁰

²⁹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia (Pertautan Negara, Khiafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi)*, h. 20-21.

³⁰ *Ibid*, h. 21-22.

Bagi sebagian umat Islam, konsep negara Islam bukanlah sesuatu yang harus disingkirkan dari pertarungan ide dan gagasan politik pada tingkat global, tetapi bagi sebagian yang lain negara Islam merupakan sesuatu yang menyatu dengan masyarakat. Kelompok yang mendukung gagasan ini mengaskan bahwa pemisahan antara wilayah pribadi dan umum, negara dan masyarakat, yang bisa ada dalam kebudayaan Barat, tidak dikenal dalam Islam. Negara adalah suatu pernyataan politik dari suatu masyarakat Islam, Islam bagi kaum muslim adalah lebih dari suatu keyakinan, itulah komunitasnya, bangsanya, ajang tempat mencapai kepribadiannya yang sejati (kedirian). Negara ataupun masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang berdasarkan kepada keyakinan bersama mengenai ke-Tuhanan. Dalam Islam sekali lagi tidak ada pemisah antara spiritual dengan yang duniawi, keduanya menyatu dalam bingkai doctrinal Islam, ia menyatu karena pemahaman atas doktrin yang integratif.³¹

Berdasarkan pandangan mengenai konsep Islam yang telah lengkap mengatur kehidupan antar manusia, maka Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, Islam membutuhkan negara sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan dan negara membutuhkan Islam sebagai panduan moralnya. Eksistensi negara dalam pandangan Islam adalah untuk mewujudkan prinsip-prinsip moral, etika, keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan.³²

³¹ *Ibid*, h. 22-23.

³² *Ibid*, h. 24.

Untuk mengatur kesederajatan, diperlukan negara yang merupakan representasi kolektif suatu komunitas. Representasi itu dalam pandangan Islam sebagai bagian integral dari usaha kolektif untuk mewujudkan suatu keteraturan sosial yang berdiri di atas pilar-pilar Islam. Sebagian besar kalangan Islam formal, legal dan tekstual meyakini sepenuhnya, bahwa yang berdaulat sesungguhnya adalah Tuhan dengan aturan dan ketentuan syari'at yang mengikat tidak saja di bumi ini tetapi juga ikatannya itu akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat. Setiap Muslim mengemban tugas untuk menyampaikan risalah Tauhid dan bersedia menerapkannya sebagai perwujudan ketaatannya kepada Allah Swt. Umat Islam tidak akan berenti pada batas-batas teritorial atau negara bangsa, melainkan harus berupaya bagaimana mewujudkan suatu pemerintahan yang terpusat, yakni pemerintahan Islam. Islam kaitannya dengan negara tidak membolehkan adanya kesetiaan yang bersifat terbatas, secara sosial, etnis atau teritorial. Sebagai contoh yang banyak dirujuk oleh kelompok Islam yang hendak mewujudkan pemerintahan yang menyatu (*Khilafah Islamiyyah*) adalah negara Madinah yang didirikan oleh Nabi. Tetapi, prototipe negara Madinah itu juga yang dirujuk oleh kalangan Islam yang tidak menyetujui model negara Islam dengan mengajukan model negara yang multi *nation-state*. Mereka beralasan bahwa Nabi tidak mendirikan Islam atau negara yang terpusat. Meski semua pihak termasuk kalangan Barat mengakui bahwa negara yang dibangun Nabi itu merupakan potret terbaik untuk dijadikan patokan bagi umat Islam dalam membangun

sebuah politik pemerintahan Madinah, menurut pendukung ide penyatuan negara Islam merupakan negara yang bersifat regional yang mencakup seluruh jazirah Arabia, bahkan dalam perkembangannya menjadi pusat pemerintahan umat Islam seluruh dunia.³³

Pemikir Islam yang dikenal sebagai “Ayah” *social science*, khususnya sosiologi yakni Ibn Khaldun, telah menggagas konsep mengenai kesatuan negara. Menurutnya, antara negara dan dinasti merupakan satu kesatuan negara itu ada selama diikat dan diperintah oleh orang-orang atau kelompok yang mereka wakili, yaitu dinasti. Kalau dinasti itu hancur, negara itu akan hancur pula. Negara bagi Ibn Khaldun merupakan konsep yang abstrak dan tidak akan eksis kalau tidak ada manusia yang memerintah. Maka ketika dinasti itu runtuh negara itu juga akan lenyap bersama dinasti atau penguasa.³⁴ Kekuasaan yang dominan merupakan ciri dari kekuasaan negara yang memasung kebebasan individu untuk berkreasi mengenai masa depan negara mereka, penguasa menjadi sumber dari segala perubahan. Penguasa demikian memiliki posisi yang hampir sejajar dengan Tuhan, karena segala sesuatu yang dikatakan oleh penguasa semacam itu menjadi mutlak dipatuhi oleh rakyatnya. Negara harus memerintah rakyatnya tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit. Artinya, kebebasan rakyat tetap terbuka sepanjang tidak melanggar hak asasi orang lain.

³³ *Ibid*, h. 25-26.

³⁴ *Ibid*, h. 29.

Pijakan Islam dalam melihat pentingnya negara adalah firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisaa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S An-Nisaa', 4:58)

Ayat ini pada prinsipnya menjelaskan bagaimana sebuah negara (pemerintahan) melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah. Mereka telah diberi amanat oleh rakyat untuk menegakkan keadilan dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Mengenai bentuk dan model negara, Islam tidak memberikan perincian yang jelas, dan Nabi juga tidak memberikan contoh mengenai bentuk negara yang ideal bagi umat Islam. Islam hanya memberikan penegasan mengenai proses pelaksanaan pemerintahan yaitu keadilan, kejujuran dan keikhlasan, dan segala sesuatu yang menyangkut hukum dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah.³⁵

C. Pembagian Negara Dalam Islam

Perbedaan syariat dengan nabi-nabi sebelumnya yang bersifat lokal dan temporal, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. bersifat internasional dan kekal hingga akhir zaman. Dengan akata lain

³⁵ Ibid, h. 31-32.

syariat Islam bersifat Universal melintas batas-batas ruang dan waktu. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah SWT dalam Q.S Saba' ayat 28 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali seluruh umat manusia, sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.*
(Q.S Saba', 34:28)

Meskipun Al-Quran mengklaim syariat Islam bersifat kekal dan universal, Al-Quran juga mengakui kebebasan manusia untuk menerima sepenuh hati dan menolaknya dengan penuh kesadaran, tanpa merasa dipaksa. Dalam Surat Saba' ayat 28 Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kebenaran Islam. Karena itu siapa yang mau beriman silakan, dan siapa yang ingkar (kafir) juga silahkan.³⁶

Dalam ayat lainpun menegaskan bahwa masalah iman seseorang adalah urusan Allah Swt, Nabi sendiripun tidak berhak memaksa seseorang lain mengikuti beliau. Firman Allah SWT dalam Q.S Yunus ayat 99.

³⁶ A.Falikh Al-Haq, “Pembagian Negara Dalam Islam”. *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni 2016), h. 81..

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya : “Kalau tuhanmu menghendaki, pastilah semua manusia dibumi ini akan beriman. Apakah engkau memaksa manusia, sehingga mereka beriman”. (Q.S Yunus, 10:99)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa secara ideal syariat Islam memang ditujukan untuk segenap manusia hingga akhir zaman. Namun realitas menunjukan bahwa tidak semua manusia menerima kebenaran Islam. Konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa syariat Islam tidak dapat diberlakukan untuk seluruh manusia. Berdasarkan kenyataan ini, jumhur ulama membagi negara yang merupakan alat kekuasaan dalam menerapkan hukum Islam kepada dua bagian, yaitu *dar al-Islam* dan *dar al-harb*. Sementara ulama Syafiiyah menambahkan kategori *dar al-ahd* atau *dar al-aman* disamping keduanya. Para ahli fikih mazhab Syi’ah Zaidiyah mengistilahkan *dar al-waqf* untuk *dar al-Islam* dan *dar al-Fasiq* untuk *dar al-Harb*. Sedangkan kelompok Khawarij sekte Ibadiyah menamakan *dar al-Islam* dengan *dar al-tawhid*, meskipun mayoritas penduduk musyrik atau munafik, selama menganut Islam tetap melaksanakan kegiatan keagamaan mereka secara terang-terangan dan aman. Untuk *dar al-harb* mereka namakan *dar al-syirk*. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan identitas suatu negara apakah termasuk *dar al-Islam* diantara mereka ada yang melihat dari sudut hukum

yang berlaku di negara tersebut. Adapula yang memandang dari sisi keamanan warganya menjalankan syariat Islam. Sementara ada yang melihat dari sisi pemegang kekuasaan negara tersebut.³⁷

Imam Abu Yusuf tokoh terbesar mazhab Hanafi berpendapat bahwa suatu Negara disebut *dar al-Islam* bila berlaku hukum Islam didalamnya, meskipun mayoritas warganya bukan muslim. Sementara *dar al-Harb*, menurutnya adalah Negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam.³⁸

Al-Kisani juga ahli Fiqh Mazhab Hanafi, memperkuat pendapat Abu Yusuf. Menurutnya *dar al-harb* dapat menjadi *dar al-Islam*, apabila negara tersebut memberlakukan hukum Islam. Dalam pemikiran modern, pandangan demikian itu pula dianut oleh Sayyid Qutub. Tokoh al-Ikhwan al-Muslimun ini memandang negara yang menerapkan hukum Islam sebagai *dar al-Islam*, tanpa mensyaratkan penduduknya harus muslim ataupun bercampur baur dengan *ahl al-zimmi*. Al-Rafi'i salah seorang tokoh mazhab Syafi', menjadikan alat ukur untuk menentukan apakah sebuah negara *dar al-Islam* atau *dar al-harb* dengan mempertimbangkan pemegang kekuasaan dalam negara tersebut. Suatu negara dipandang sebagai *dar al-Islam* apabila dipimpin oleh seorang muslim. Pendapatnya ini didasarkan oleh kenyataan yang pernah dikembang pada masanya, dimana seorang pemimpin sangat berpengaruh dan menentukan keputusan-keputusan politik negara tersebut. Seorang pemimpin muslim

³⁷ *Ibid*, h. 82.

³⁸ *Ibid*, h. 82-83.

yang memiliki komitmen kepada ajaran agamanya tentu akan berusaha menjalankan nilai-nilai Islam dan hukum Islam di negara yang dipimpinnya.

Imam Abu Hanifah membedakan *dar al-Islam* dan *dar al-Harb* berdasarkan rasa aman yang dinikmati penduduknya. Bila umat Islam merasa aman dan at Home dalam menjalankan aktivitas keagamaan mereka, maka negara tersebut termasuk *dar al-Islam*. Sebaliknya, bila tidak ada rasa aman untuk umat Islam, maka negara itu masuk katagori *dar al-harb*.

Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa *dar al-Islam* adalah Negara yang wilayahnya didiami oleh (Mayoritas) orang-orang Islam dan hukum yang berlaku dinegara tersebut adalah hukum Islam. Bila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka negara itu bukan *dar al-Islam*.

Dari perbedaan-perbedaan pendapat diatas, dapat ditarik benang merah bahwa mayoritas ahli fiqh mensyaratkan suatu negara sebagai *dar al-Islam*, bila pemegang kekuasaan beragama Islam, sehingga hukum Islam dapat mereka jalankan dengan baik. Kalau hal ini tidak terlihat, maka negara tersebut termasuk kedalam katagori *dar al-harb*. Konsekuensi logis dari kenyataan ini adalah bahwa umat Islam akan memperoleh jaminan keamanan di negara atau wilayah tersebut. Sebaliknya, dengan tidak berlakunya hukum Islam dan berkuasanya orang

non-muslim di negara tersebut, maka negara itu disebut *dar al-harb* meskipun ada umat Islam yang tinggal disana.³⁹

D. Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Fiqh Siyasah

Prinsip-prinsip umum bernegara menurut fiqh siyasah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang konsep keadilan, dalam hal yang berhubungan dengan prinsip bernegara dalam Islam akan dikutip beberapa ayat-ayat yang relevan dengan topik ini yaitu.

Dalam Q.S An-Nisaa' ayat 135.⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا
تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّذُواْ أَوْ تَعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata)

³⁹ Ibid. h.83-84.

⁴⁰ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 117.

atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S An-Nisaa’, 4:135)

Ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menegakan keadilan yaitu:

- a. Kewajiban menegakkan keadilan bagi setiap manusia di bumi, terutama bagi orang-orang yang beriman.
- b. Setiap mukmin yang menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.⁴¹ Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa menjadi saksi dengan sejujur-jujurnya bukan hanya berlaku bagi kaum mukmin saja, akan tetapi berlaku bagi semua lapisan masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim.
- c. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

2. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Dalam Q.S An-Nisaa’ ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan

⁴¹ Ibid, h. 118.

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (Q.S An-Nisaa', 4:58)

Amanah dalam hal ini seperti jabatan Bupati, Wali Kota, Menteri, maupun Presiden maka semua itu hakikatnya sebagai pemegang amanah yang diberikan Allah SWT sebagai karunia-Nya, dan merupakan tugas yang diberikan rakyat kepada pemimpinnya harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Kekuasaan juga harus didasari dengan prinsip menegakkan keadilan yang merupakan suatu perintah Allah yang wajib dilaksanakan dan juga pertanggungjawaban yang berat, tidak hanya di dunia melainkan juga pertanggungjawaban di akhirat. Menurut aturan Islam, seorang pemimpin adalah wakil dari rakyat yang bertugas mewujudkan maslahat bagi umat dan menjaga eksistensi agama sesuai dengan tuntunan hukum syara.⁴²

3. Prinsip Musyawarah

Prinsip Musyawarah terdapat dalam Q.S Al-Imran ayat 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ كُلَّ فَتْوٍ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

⁴² Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandang Harapannya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Pustaka Al-Khausar, 2013), h. 55.

Artinya : *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.* (Q.S Al-Imran, 3:159)

Al-Qur'an memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan Negara Islam.⁴³ Dalam hal ini musyawarah adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik, seperti hak mereka untuk memilih pemimpin, dan juga untuk mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga wajib bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Sebagai prinsip, maka Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengaturnya. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukannya.⁴⁴ Pada waktu itu, musyawarah cukup dilakukan di masjid, karena pada hakikatnya masjid merupakan pusat seluruh kegiatan baik ibadah maupun mu'amalat. Tradisi ini berlanjut pada keempat khalifah yang menggantikan Rasulullah yaitu, Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali.

⁴³ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 36.

⁴⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Diliat Dari Segi Hukum Islam*, h. 41.

4. Prinsip Persamaan

Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketaqwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Persamaan dalam Al-Qur'an pula pada dasarnya memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan tentang politik yakni terdapat dalam Q.S Al-An'am ayat 165 dan Q.S Al-Baqarah ayat 30 yakni.⁴⁵

Surat Al-An'am ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(Q.S Al-An'am, 6:165)

Surat Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي

⁴⁵ Arief Subhan dkk, *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Orman keagamaan*, (Jakarta: PT SUN, 2003), h. 70.

أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S Al-Baqarah, 2:30)*

Pada dasarnya hak seorang perempuan itu sama dengan laki-laki, maka dalam hal ini seorang wanita dapat menjadi seorang pemimpin apabila telah memenuhi syarat-syarat memimpin. Perbedaan antara keduanya hanyalah pada fungsi utama dari masing-masing jenis sesuai dengan kodratnya seperti melahirkan, menyusui, dan wanita tetap berkewajiban menghormati suaminya sebagai kepala keluarga.

5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip itu ditegaskan dalam Al-Qur'an antara lain dalam surah Al-Israa' ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan*

mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan". (Q.S Al-Israa', 17:70)

Ayat tersebut mengekspresikan kemuliaan manusia dalam Al-Qur'an dengan istilah karamah (kemuliaan). Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy membagi karamah itu menjadi tiga kategori yaitu

- a. Kemuliaan pribadi atau karamah fardiyah yang artinya dilindungi pribadinya maupun hartanya.
- b. Kemuliaan atau karamah ijtimaiah yang artinya persamaan dijamin sepenuhnya. dan
- c. Kemuliaan politik atau karamah siyasah yang artinya Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuh bagi setiap orang warga negara, karena kedudukannya yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai Khalifah.⁴⁶

6. Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip peradilan bebas dalam ini memiliki makna kewenangan hakim pada setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun, dan wajib pula memperhatikan prinsip amanah sebagaimana yang tercatum dalam Q.S An-Nisaa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

⁴⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Diliat Dari Segi Hukum Islam*, h. 130.

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*. (Q.S An-Nisaa', 4:58)

7. Prinsip Perdamaian

Al-Qur'an dengan tegas menyeru kepada orang-orang yang beriman agar masuk kedalam perdamaian. Hubungan dengan negara-negara harus dijalin dan berpegang kepada prinsip perdamaian. Prinsip perdamaian ini ditegaskan yakni tertera dalam Q.S Al-Baqarah ayat 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”*. (Q.S Al-Baqarah, 2:208)

Dalam mewujudkan perdamaian antar negara maka dibuatlah perjanjian mengenai hak dan kewajiban antar negara tersebut yang sekarang lebih kita kenal dengan perjanjian Internasional. Prinsip perdamaian ini wajib ditaati oleh setiap negara dan warga negaranya. Hal lain yang menyebabkan perjanjian ini tidak ditaati oleh negara

yang bersangkutan disebabkan karena hal-hal tertentu yang sifatnya darurat (alasan yang benar dan adil) seperti mempertahankan diri dari apabila terjadi perang. Islam adalah agama yang berwatak damai dan mementingkan al-akhlak al-karimah, hal ini pun ditujukan bukan hanya ketika damai, tetapi juga diwaktu perang. Penyebab peperangan diantaranya adalah fitrah manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna, yang dapat berbuat salah. Dengan kemampuan manusia untuk berbuat salah, maka akan selalu ada orang yang memilih melanggar watak dirinya dan batas-batas ketentuan Tuhan.⁴⁷ Watak lain dari manusia yang ingin hidup diatas bumi dalam keadaan harmonis dan damai dengan makhluk hidup lain inilah yang menimbulkan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya perdamaian.

Fungsi manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi inilah yang harus tetap mempertahankan perdamaian, namun disisi lain kedamaian yang sejati bukanlah tanpa adanya peperangan, tetapi mencegah adanya faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan atau konflik yang pada akhirnya menyebabkan kesia-siaan dan kerusakan.

8. Prinsip Kesejahteraan

Dalam Islam prinsip kesejahteraan diwujudkan melalui pentingnya zakat dalam negara hal ini sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 103.

⁴⁷ Mun'in A Sirry, *Membendung Militansi Agama Imam dan Politik dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2003), h. 73.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S At-Taubah, 9:103)

9. Prinsip Ketaatan Rakyat

Hubungan antara pemerintahan, rakyat, dan Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan dalam Q.S An-Nisaa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ عَصَيْتُمْ
تَنَزَّلْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisaa', 4:59)

Hazairin menafsirkan ”mentaati Allah” ialah tunduk kepada ketetapan Allah, mentaati Rasul ialah tunduk kepada ketetapan-

ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW dan mentaati ulil amri ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya.⁴⁸

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperdalam analisis tentang tulisan ini maka penulis meninjau beberapa tulisan yang ada kaitannya dengan Hasan Al-Banna dan yang berkaitan dengan konsep Negara Islam itu sendiri.

Penelitian sejenis yang membahas mengenai masalah Negara Islam berdasarkan tokoh pemikir Islam sangat banyak, khususnya yang terkait dengan pembahasan ini, karena permasalahan termasuk wacana yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Oleh karena itu banyak intelektual muda yang mengangkat isu-isu tentang hal ini dalam bentuk buku-buku ilmiah, skripsi maupun artikel.

Trias Sundara Julia, *Tinjauan Kritis Konsep Negara Menurut Hasan Al-Banna dan Relevansinya Terhadap Konsep Negara Pancasila*, Skripsi, Yogyakarta, UGM, 2017. Dalam skripsi ini penulis sama-sama membahas tentang konsep Negara menurut Hasan Al-Banna namun yang membedakan dalam skripsi ini Trias Sundara Julia merelevansikannya dengan konsep Negara pancasila, sedangkan penulis menganalisis menggunakan fiqh siyasah.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Diliat Dari Segi Hukum Islam*, h. 153.

⁴⁹ Trias Sundara Julia "Tinjauan Kritis Konsep Negara Menurut Hasan Al-Banna dan Relevansinya Terhadap Konsep Negara Pancasila" Skripsi Fakultas Filsafat, Universitas Gajah Mada 2017.

Tri Purwo Andiyanto, *Konsep Negara Islam Menurut Hasan Al-Banna dan Abul A'la Al-Maududi*, Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009. Dalam skripsi ini penulis sama-sama membahas tentang Konsep Negara Islam Menurut Hasan Al-Banna namun yang membedakan dalam skripsi ini Tri Purwo Andiyanto membandingkan pemikiran Hasan Al-Banna dengan pemikiran Abul A'la Al-Maududi, sedangkan penulis menganalisis dengan fiqh siyasah.⁵⁰

Hani Ammariah, *Studi Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Negara Islam*, Jurnal Filsafat dan Teologi Islam, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2018. Dalam jurnal ini sama-sama membahas tentang Konsep Negara Menurut Hasan Al-Banna namun yang membedakan dalam jurnal ini adalah Hani Ammariah hanya spesifik membahas mengenai Konsep Negara menurut Hasan Al-Banna saja, sedangkan penulis lalu menganalisis dengan fiqh siyasah.⁵¹

⁵⁰ Tri Purwo Andiyanto “*Konsep Negara Islam Menurut Hasan Al-Banna dan Abul A'la Al-Maududi*” Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga 2009.

⁵¹ Hani Ammariah, “Studi Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Negara Islam”. *Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
- Anwar Al-Jundi, *Biografi Hasan Al-Banna*, (Solo: Media Insani Press, 2003).
- Arief Subhan dkk, *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Orman keagamaan*, (Jakarta: PT SUN, 2003).
- Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1998).
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005).
- Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwwanul Muslimin Jilid I*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2018).
- J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta :Penerbit Ombak : 2014).
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia, 2014).
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Muith Muhammad Ishaq, *Fiqh Politik Hasan Al-Banna*, (Jakarta : Robbani Press, 2012.)
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008).
- Mun'in A Sirry, *Membendung Militansi Agama Imam dan Politik dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2003).
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI Press, 2011).

Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandang Harapannya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Pustaka Al-Khausar, 2013).

Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia (Pertautan Negara, Khiafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi)*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008).

Zakaria Syafe'I, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012).

Sumber Jurnal

A.Falikh Al-Haq, Pembagian Negara Dalam Islam, *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2016

A. Zaeny, Hasan Al-Banna dan Strategi Perjuangannya, *Jurnal Al-Adyan*, Vol. VI, No. 2, Juli-Desember 2011.

Hani Ammariah, Studi Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Negara Islam, *Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2018.

Muhammad Misbah, Kontribusi Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna Terhadap Pemikiran Islam Modern, *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Otoman, Pemikiran Politik Hasan Al-Banna (1906-1949) dan Pembentukan Radikalisme Islam, *Jurnal Tamaddun*, Vol. XV, No. 1, Juni 2015.

Raudhatul Jannah, Pemikiran Pendidikan Islam Hasan Al-Banna, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 6 No.1, Januari-Juni 2017.

Sumber Skripsi

Dea Fanny Utari, “*Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila*”, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).

Gita Fitriyani, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*”, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019).

Tri Purwo Andiyanto “*Konsep Negara Islam Menurut Hasan Al-Banna dan Abul A’la Al-Maududi*” Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga 2009.

Trias Sundara Julia “*Tinjauan Kritis Konsep Negara Menurut Hasan Al-Banna dan Relevansinya Terhadap Konsep Negara Pancasila*” Skripsi Fakultas Filsafat, Universitas Gajah Mada 2017.